

***Innovative Governance* dalam Penerapan *Smart Village* sebagai Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
(Studi Kasus: Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung)**

I Gede Krisna Yudandi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: krisna.yudandi@gmail.com

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: putriwirantari@unud.ac.id

Juwita Pratiwi Lukman

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: juwitapratiwilukman@unud.ac.id

Korespondensi penulis: krisna.yudandi@gmail.com

Abstract: Kutuh Village has succeeded in providing a change from a poor village to one of the richest villages in Indonesia, showing the commitment of the Kutuh Village Government in developing villages. However, some problems that occur such as community awareness, village funding design and human resources in each element. With a study using innovative governance indicators from Tahir (2016: 284). This type of research is descriptive qualitative. The determination of informants is carried out by purposive techniques and snowball sampling. Data analysis is carried out by reduction, presentation of data and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of Smart Village in Kutuh Village has succeeded in achieving innovative governance. However, it needs to be optimized again on indicators of community participation Recommendations that can be given are optimizing community empowerment programs and changing policies regarding the implementation of smart villages in Kutuh Village.

Keywords: Implementation, Innovative Governance, Kutuh Village, Smart Village

Abstrak: Desa Kutuh telah berhasil memberikan perubahan dari desa miskin menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa Kutuh dalam membangun desa. Namun, beberapa permasalahan yang terjadi seperti kesadaran masyarakat, desain pendanaan desa dan sumber daya manusia di setiap elemen. Dengan kajian menggunakan indikator tata kelola pemerintahan yang inovatif dari Tahir (2016:284). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive dan snowball sampling. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Smart Kampung di Desa Kutuh telah berhasil mencapai tata kelola pemerintahan yang inovatif. Namun perlu dioptimalkan lagi pada indikator partisipasi masyarakat. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat dan perubahan kebijakan terkait implementasi smart kampung di Desa Kutuh.

Kata kunci: Implementasi, Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Desa Kutuh, Smart Kampung

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan di setiap daerah tentu tidak terlepas dari adanya pembangunan di wilayah desa. Saat ini, desa telah diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya masing-masing melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadikan desa tidak hanya menjadi objek pembangunan daerah saja namun desa saat ini sudah menjadi subjek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam prosesnya, pembangunan wilayah desa

memerlukan bantuan dari berbagai pihak beserta para *stakeholder* yang ada untuk menjamin keberhasilan pembangunan yang lebih baik (Listyaningsih, 2014:18). Hal ini senada dengan bagian dari SDGs Desa nomor 17 yang mencakup tentang “kemitraan untuk pembangunan desa” yang memberikan celah untuk melakukan suatu kerjasama untuk melakukan perubahan bagi desa berlandaskan keharmonisan hubungan antar pihak internal maupun eksternal desa.

Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak pada peningkatan kinerja pembangunan yang terjadi dari segi efisiensi dan produktivitas pembangunan karena kehadiran teknologi ini memberi kebebasan dalam memanfaatkan waktu, tenaga, jarak, dan pikiran dalam pengembangan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase pemanfaatan teknologi pada masing-masing daerah. Provinsi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan persentase pemanfaatan teknologi tertinggi menurut jenis aktivitas penduduk. Indeks persentasenya dilihat dari penggunaan telepon seluler sebanyak 83,98%, penggunaan komputer sebanyak 15,69% dan internet sebanyak 73,34% dilihat dari masing-masing wilayah di Provinsi Bali per-akhir tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023).

Pemanfaatan inovasi berbasis teknologi dalam pembangunan tata kelola desa merupakan suatu urgensi bersama yang akan ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan sering disebut dengan *Innovative Governance*. *Innovative Governance* menjadi solusi dalam menjawab tantangan pembangunan masa kini dan masa yang akan datang (Utomo, 2016:17). Sebab meningkatkan efektivitas, efisiensi, pengintegrasian layanan, pemetaan, transparansi dari pembangunan yang sedang berjalan.

Desa Kutuh menjadi salah satu desa yang mengimplementasikan *innovative governance* dalam tata kelola pemerintahan desa. Secara perlahan Desa Kutuh menerapkan konsep *smart village* melalui inovasi tata kelola pemerintahan desa. Pengembangan konsep ini tentu disesuaikan dengan konstruksi dasar *smart village* yaitu: *Smart Government*; *Smart Community*, *Smart Environment* yang digabungkan dengan nilai, norma dan karakter Desa Kutuh. Bentuk inovasi tata kelola pemerintahan berbasis *smart village* yang dikembangkan di Desa Kutuh meliputi: (1) *Smart Government*: Sistem Administrasi Pemerintah Desa, Sistem Administrasi Penduduk Pendatang (SIGAP), Website Resmi Desa.; (2) *Smart Community*: BUMDES Manik Sedana Kutuh dan BUMDA Kutuh; (3) *Smart Environment*: TPS3R Desa Kutuh, Jaga Desa Kutuh, Pengadaan CCTV ditujukan untuk menumbuhkan lingkungan Desa Kutuh yang nyaman, aman dan tentram.

Penerapan *smart village* di Desa Kutuh harus sesuai dengan indikator *innovative governance* meliputi lima indikator meliputi: (1) layanan terintegrasi; (2) Desentralisasi; (3)

Pemanfaatan kerjasama; (4) keterlibatan warga; (5) Pemanfaatan teknologi (Tahir, 2016:284). Penerapan *smart village* di Desa Kutuh sejak tahun 2017 memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan Desa Kutuh, melalui inovasi dalam beberapa sektor seperti ekonomi, administrasi, sosial budaya, lingkungan dan sumber daya. Dalam satu tahun penerapan *smart village* dapat meningkatkan jumlah keluarga sejahtera Desa Kutuh pada tahun 2017 yang berjumlah 921 keluarga menjadi 1022 keluarga pada tahun 2018, sehingga pada tahun tersebut Desa Kutuh menjamin masyarakatnya sejahtera serta mendeklarasikan desa dengan 0% kemiskinan.

Keberhasilan Desa Kutuh dalam mengukir prestasi dan mensejahterakan masyarakatnya melalui berbagai penerapan inovasi tata kelola pemerintahan tentu tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti: (1) manajemen program-program *smart village* harus selalu *up to date*; (2) kesadaran masyarakat terkait program yang ada maupun program baru; (3) rancangan pendanaan desa untuk pembangunan infrastruktur masa depan desa; (4) sumber daya manusia pada setiap elemen. Adanya tantangan ini masih perlu diperhatikan mengingat program-program inovasi akan terus selalu berkembang seiring berjalannya waktu, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Innovative Governance* Dalam Penerapan *Smart Village* Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung)”.

KAJIAN PUSTAKA

Innovative Governance

Inovasi tata kelola pemerintahan ini sering disebut dengan *innovative governance*. *Innovative governance* dijadikan sebuah upaya dalam meningkatkan tata kelola sekaligus mengatasi masalah publik secara efektif dan efisien di tengah tren penggunaan teknologi saat ini, maka pada pelaksanaan sebuah inovasi tata kelola pemerintahan memerlukan beberapa indikator pencapaiannya guna memberikan hasil yang terbaik bagi seluruh elemen yang berkontribusi (Tahir, 2016: 284) diantaranya:

1. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan yang menjawab harapan warga dimana setiap warga pasti meminta layanan yang disediakan harus disertai dengan kenyamanan.
2. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis.

3. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.
4. Partisipasi masyarakat, kewenangan pemerintah yang inovatif harus merealisasikan peran-peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.
5. Pemanfaatan teknologi, pemanfaatan teknologi dalam informasi dan komunikasi mendorong tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi dalam melakukan komunikasi dan saling bertukar informasi.

Smart Village

Smart village dipahami sebagai integrasi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat pedesaan, sehingga menghasilkan kemanfaatan dan kesinambungan antara teknologi informasi dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat diberikan prioritas mengenai potensi dan karakter mana yang ingin dikembangkan dan dilembagakan melalui dukungan teknologi informasi, sehingga akan tercipta pemanfaatan teknologi yang tepat guna didasarkan kepada kebutuhan dan karakter masyarakat. Dalam *smart village* terdapat elemen penunjang keberhasilan yaitu *smart government*, *smart community*, *smart environment*. (Herdiana, 2019:5). Melalui adanya penyesuaian teknologi yang berkembang dengan nilai budaya, karakter dan norma yang ada di desa, tentunya hal ini diharapkan mampu menciptakan sinergitas di antara ketiga elemen tersebut untuk mewujudkan pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengambilan sampel atau data secara langsung berdasarkan masalah dan situasi di lapangan kemudian hasil dari temuan tersebut disusun dalam bentuk narasi yang terstruktur secara deskriptif (Mulyana, 2016:150). Data pada penelitian ini didapat dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer yang didapat dari hasil wawancara dan observasi lapangan dan sekunder yang didapat dari dokumentasi literatur, arsip dan tulisan–tulisan ilmiah. Kemudian informan penelitian terdiri dari: Kepala Desa Kutuh, Sekretaris Desa Kutuh, Koordinator Pengembangan *Smart Village* Desa Kutuh, Pihak Mitra Desa Kutuh, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, serta Krama atau Masyarakat Desa Kutuh yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik analisis data melalui tiga tahapan

yaitu: Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis data yang sudah didapatkan akan disajikan dalam bentuk naratif meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi terkait penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Smart Village* di Desa Kutuh

Desa Kutuh menerapkan konsep *smart village* ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi Desa Kutuh, Penerapan *smart village* di Desa Kutuh sendiri sudah diatur dalam Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Desa Pintar (*Smart Village*) di Desa Kutuh. Adanya *smart village* ini juga berpengaruh terhadap pembangunan daerah khususnya wilayah desa, karena desa secara mandiri memanfaatkan perkembangan teknologi, sinergitas, asset dan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai tujuan dari pembangunan Desa Kutuh.

Gambar 1. Langkah-Langkah Penerapan *Smart Village* di Desa Kutuh



Sumber : Data Primer Penulis Diolah Dari Wawancara Dengan Koordinator Pengembangan *Smart Village* Desa Kutuh I Gede Agus Sudiantara, 2024

Gambar tersebut menunjukkan langkah-langkah penerapan *smart village* di Desa Kutuh yang dimulai dari tahun 2013 dengan langkah awal melakukan pemetaan kewilayahan dan potensi di Desa Kutuh, melakukan penguatan komitmen dari pemerintah desa, desa adat dan masyarakat yang menghasilkan pembentukan BUMDA Kutuh dan BUMDES Manik Sedana Kutuh, kemudian dilanjutkan dengan pengadaan infrastruktur penunjang untuk melancarkan mobilitas desa, lalu merancang konsep *smart village* untuk memantapkan pembangunan desa, menerapkan konsep *smart village* yang dilihat selama satu tahun untuk melakukan pengembangan program-program *smart village* yang sudah diluncurkan, kemudian Pemerintah Desa Kutuh sempat mendapat tantangan yaitu pandemi Covid-19 dan berangsur pulih dengan melakukan transisi pasca pandemi Covid-19, akhirnya Desa Kutuh mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena berhasil membangun desa untuk mensejahterakan masyarakatnya,

apresiasi ini kemudian mendorong Pemerintah Desa Kutuh untuk selalu mengoptimalkan *smart village* sebagai sarana pembangunan desa.

Desain Smart Village di Desa Kutuh

Smart village di Desa Kutuh di desain sesuai dengan indikator keberhasilan *smart village* yaitu: (1) *Smart governance*; (2) *Smart community*; (3) *Smart environment*. Desain ini dipakai karena Pemerintah Desa Kutuh melihat *smart village* sebagai konsep modernisasi tata kelola pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan produk digital namun *smart village* dijadikan landasan untuk mengembangkan perekonomian dan potensi Desa Kutuh. Pemerintah Desa Kutuh sudah meluncurkan kurang lebih duapuluh lima program yang terbagi kedalam tiga bidang.

Pertama, *Smart Government*: (1) *website* resmi desa www.kutuh-badung.desa.id; (2) Sistem Administrasi Pemerintahan Desa; (3) Sistem Administrasi Desa dan Kelurahan (SIADEK); (4) Mall Pelayanan Publik Desa Kutuh (5) *Electronic Survey* (E-Survey); (6) Sistem Pemetaan GIS (SIGADIS); (7) Telunjuk Sakti; (8) Akun Media Sosial Desa Kutuh; (9) Absensi Pegawai Online; (10) Pengadaan WiFi, (11) Open SID Desa Kutuh; (12) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Kedua, *Smart Community*: (1) Memanfaatkan potensi alam desa (Pantai Pandawa, Gunung Payung, Tanah Barak); (2) Membentuk Bagha Usaha Manunggal Desa Adat (BUMDA) Kutuh dan BUMDES Manik Sedana Kutuh; (3) Kampung Bola (*sport tourism*); (4) *Timbs Paraglaiding*; (5) Inovasi Delima; (6) Desa Wisata Kutuh; (7) Angkringan Kampoeng Muda; (8) Piranti Yadnya.

Ketiga, *Smart Environment*: (1) Membentuk TPS3R Desa Kutuh; (2) Inovasi GEMES; (3) Pengadaan CCTV; (4) Pembentukan Jaga Desa Kutuh; (5) Sistem Tanggap Penduduk Pendetang (SIGAP).

Analisis Hasil Temuan

Analisis ini menggunakan teori *Innovative Governance* menurut (Tahir, 2016:284). meliputi lima indikator yaitu: (1) layanan terintegrasi; (2) desentralisasi; (3) pemanfaatan kerjasama; (4) partisipasi masyarakat; (5) pemanfaatan teknologi. Penjabaran analisis hasil temuan dijelaskan sebagai berikut.

1. Layanan Terintegrasi

Pemerintah Desa Kutuh memberikan berbagai layanan kepada masyarakatnya harus mencakup tiga sektor penting yaitu: (1) pelayanan publik; (2) ekonomi; (3) lingkungan. Jika ketiga sektor tersebut mampu dijangkau oleh layanan yang disediakan maka, indikator layanan terintegrasi berhasil tercapai. Beranjak dari hal tersebut Pemerintah Desa Kutuh dengan

menerapkan konsep *smart village* berusaha mencakup tiga sektor tersebut agar dapat menjamin pengintegrasian layanan yang didapatkan oleh masyarakat.

Pertama, layanan terintegrasi pada sektor pelayanan publik. Mengacu pada tabel diatas sektor pelayanan publik mendapat pengaruh yang signifikan dari yang awalnya bersifat konvensional berubah menjadi serba digital. Selain itu layanan yang didapatkan oleh masyarakat terbilang cepat dan memuaskan. Melalui penerapan smart village juga mendorong Pemerintah Desa Kutuh untuk mengembangkan sistem layanan digital pada proses pelayanan publik seperti: SIADEK, SIGADIS, Website Resmi Desa, Sistem Administrasi Pemerintahan Desa. Tentunya hal ini merubah pandangan masyarakat desa yang awalnya menganggap pelayanan publik itu adalah hal yang membosankan dan ribet menjadi ceria untuk melakukan pelayanan karena mereka merasakan perubahan dan hasil yang diterima begitu cepat dan tepat. Namun sempat terkendala karena adanya tindakan *cybercrime* yang terjadi, adanya permasalahan ini membuat Pemerintah Desa Kutuh untuk menonaktifkan beberapa sistem layanan yaitu SIADEK dan SIGADIS, kemudian menggantinya dengan sistem Open SID dengan melakukan sinkronisasi data bersama Disdukcapil Kabupaten Badung dan Satu Data Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga sekarang sistem layanan yang digunakan oleh Pemerintah Desa Kutuh memakai sistem Open SID karena dirasa cukup untuk mengganti sistem SIADEK dan SIGADIS dalam melakukan pelayanan.

Kedua, layanan terintegrasi pada sektor ekonomi. Melalui penerapan *smart village* Pemerintah Desa Kutuh mengupayakan pertumbuhan ekonomi di Desa Kutuh dengan mengoptimalkan peranan BUMDA Kutuh dan BUMDES Manik Sedana Kutuh sebagai garda terdepan untuk bersama mengembangkan perekonomian masyarakat. Melalui beberapa program Pemerintah Desa Kutuh menata perekonomian dengan bekerjasama bersama para masyarakat yang memiliki usaha yang menyediakan akomodasi seperti *guesthouse*, *villa*, dan restoran sebagai penyedia akomodasi untuk membantu program Desa Wisata Kutuh dan layanan *Sport Tourism*. Layanan ekonomi yang ada Melalui BUMDA Kutuh dan BUMDES Kutuh berhasil menghimpun masyarakat dengan merekrut sebanyak 114 orang menjadi mitra dan memberikan pembinaan kepada 200 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu melalui program-program yang ada tercatat kurang lebih 500 tenaga kerja di setiap usaha-usaha yang bekerjasama dengan Desa Kutuh. Integrasi antara Pemerintah Desa Kutuh, masyarakat, badan usaha, dan pihak yang menjalin kerjasama dengan Desa Kutuh dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan perekonomian desa melalui layanan program perekonomian yang dibentuk.

Ketiga, layanan terintegrasi pada sektor lingkungan. Dalam penerapan *smart village*, Pemerintah Desa Kutuh juga berorientasi pada keberlangsungan lingkungan alam desa yang mencakup seluruh elemen membentuk karakter lingkungan desa tersebut. Dengan memberikan layanan pengelolaan sampah, membentuk TPS3R Desa Kutuh, Pengadaan CCTV di beberapa titik, serta Pembentukan Jaga Desa Kutuh. Adanya layanan terkait lingkungan ini mampu menciptakan kondisi Desa Kutuh yang bersih akibat pengelolaan sampah yang teratur dengan dimulai di masing-masing banjar yang ada sehingga memberikan kesan keindahan di setiap tempat terlebih objek wisata di Desa Kutuh yang ditata dengan baik memberikan kesan keindahan jika berkunjung kesana. Selain itu keamanan di setiap wilayah Desa Kutuh juga dijamin karena adanya satuan keamanan desa yaitu Jaga Desa Kutuh yang rutin berpatroli selama 24 jam.

Berdasarkan pemaparan dari masing-masing sektor tersebut, dapat diketahui bahwa indikator layanan terintegrasi sudah berhasil terpenuhi karena sebagian besar layanan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Kutuh sudah bisa mengintegrasikan masyarakat desa secara menyeluruh. Meskipun ada permasalahan dalam hal *cybercrime* dan server, namun hal tersebut sudah dapat diatasi dengan baik. Selain itu layanan terintegrasi yang dibentuk berdasarkan penerapan *smart village* menjadikan Desa Kutuh bisa mendapat kepercayaan penuh dari berbagai pihak dan hasilnya yaitu berbagai penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Desa Kutuh salah satunya yang terbaru yaitu Posisi ke III Pemerintahan Desa Terbaik Pada Mangupura Award 2023.

2. Desentralisasi

Desentralisasi berperan sebagai strategi Pemerintah Desa Kutuh untuk menciptakan tata kelola pemerintahan melalui *smart village* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi desa, serta pembangunan desa. Strategi dari desentralisasi yang terjadi mencakup monitoring, penyebaran informasi dan evaluasi terkait program-program yang sudah dilaksanakan melalui konsep *smart village*.

Pertama, strategi monitoring, Pemerintah Desa Kutuh menggunakan strategi monitoring untuk melaksanakan desentralisasi yang bertujuan untuk memantau perkembangan layanan dan program yang sudah dijalankan untuk masyarakat. Pemerintah Desa Kutuh selalu mengupayakan untuk terjun langsung memantau perkembangan program inovasi mereka ke masyarakat desa. Upaya dalam memonitoring rapat-rapat banjar yang diselenggarakan biasanya selama tiga bulan sekali atau triwulan. Selain itu monitoring bersama Pemerintah Kabupaten Badung terus dilaksanakan baik itu dengan dinas atau lembaga pemerintahan terkait jalannya suatu program. Hal ini ditempuh agar program yang dimiliki oleh Pemerintah Desa

Kutuh bisa selalu bersinergi dengan program yang ada di Pemerintah Kabupaten Badung. Untuk itu strategi monitoring berhasil membentuk alur desentralisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan para elemen pemerintahan.

Kedua, penyebaran informasi. Pemerintah Desa Kutuh menginginkan desentralisasi yang terjadi bisa mencapai seluruh elemen yang ada, maka dari itu strategi dalam penyebaran informasi dilakukan untuk memuluskan program inovasi yang ada. Penyebaran informasi yang transparan dan akuntabel menjadi tujuan dari Pemerintah Desa Kutuh dengan melakukan upaya pendekatan melalui layanan yang ada. Pemerintah Desa Kutuh mengupayakan Website Resmi Desa untuk menyebarkan informasi, biasanya pemerintah desa akan merangkum semua kegiatan baik itu berita desa, kinerja pemerintah, layanan, serta keuangan desa. Melalui website www.kutuh-badung.desa.id Pemerintah Desa Kutuh mengharapkan penyebaran informasi yang transparan bagi masyarakat kemudian, informasi yang ada juga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Pemerintah Desa Kutuh. Kemudian pemerintah desa membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Kutuh sebagai admin dari media sosial yang dimiliki Pemerintah Desa Kutuh.

Ketiga, strategi evaluasi. Pemerintah Desa Kutuh selalu terbuka bagi segala aspirasi masyarakat sebagai cara untuk menilai keberhasilan agar dapat membenahi program yang dirasa kurang sesuai atau tidak tepat sasaran. Maka dari itu Pemerintah Desa Kutuh rutin melakukan evaluasi terhadap program inovasi yang diselenggarakan pemerintah desa baik itu dari pertemuan yang dilangsungkan dengan masyarakat. Selain itu permasalahan atau urgensi yang timbul di tengah masyarakat menjadi menjadi bahan evaluasi Pemerintah Desa Kutuh yang biasanya disampaikan saat rapat di masing-masing banjar maupun rapat resmi pemerintah desa. Untuk meningkatkan evaluasi di masyarakat, Pemerintah Desa Kutuh juga meluncurkan sistem layanan E-Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Desa Kutuh <https://ikm.desakutuh.co.id> yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Melalui hasil temuan yang didapat indeks kepuasan masyarakat Desa Kutuh berada di angka 85,35% per-akhir tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis temuan, diketahui bahwa indikator desentralisasi pada Pemerintah Desa Kutuh berhasil terpenuhi. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kutuh berhasil mengupayakan desentralisasi pada setiap elemen dari Pemerintah Kabupaten Badung sampai pada masyarakat. Namun untuk lebih mengoptimalkan proses desentralisasi di Pemerintah Desa Kutuh, masih perlu meningkatkan respon masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa, melalui survey kepuasan masyarakat tercatat hanya 117 responden yang mengisi survey tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merespon program-program yang ada. Beranjak

dari hal tersebut, Pemerintah Desa Kutuh berhasil melakukan desentralisasi yang dibuktikan dengan ditunjuknya Desa Kutuh menjadi Desa Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada tahun 2022 lalu.

3. Pemanfaatan Kerjasama

Pemerintah Desa Kutuh dalam menerapkan *smart village* memanfaatkan kerjasama dalam mengembangkan layanan maupun program inovasi yang dijalankan. Pemanfaatan kerjasama dilakukan bersama berbagai pihak diantaranya: (1) Pemerintah Kabupaten Badung (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informasi); (2) Pihak Swasta (CV. Immortal Solution; Biznet; PT. Telkom Indonesia); (3) Masyarakat Desa Kutuh.

Pertama, pemanfaatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Badung. Ada empat instansi dari Pemerintah Kabupaten Badung yang diajak bekerjasama oleh Pemerintah Desa Kutuh yaitu: (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD); (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil); (3) Dinas Informasi dan Komunikasi (Diskominfo); (4) Satu Data Badung. Hasil temuan penelitian menunjukkan Pemanfaatan Kerjasama yang terjadi dimulai sejak Pemerintah Desa Kutuh Mulai merancang penerapan *smart village* di Desa Kutuh. Kerjasama yang dilakukan biasanya untuk memenuhi kegiatan operasional pada Pemerintah Desa Kutuh mulai dari pengintegrasian data, koordinasi, monitoring, implementasi program, evaluasi dan pengawasan yang menghasilkan Hubungan timbal balik demi membentuk sistem birokrasi yang aman, nyaman, transparan dan akuntabel sehingga masing-masing lembaga bisa mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan kerjasama yang terjadi.

Kedua, pemanfaatan kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Desa Kutuh untuk memperluas dan meningkatkan jaringan di Desa Kutuh, selain itu juga PT. Telkom Indonesia mendukung upaya Pemerintah Desa Kutuh dalam melakukan penataan infrastruktur internet demi meminimalisir kesemrawutan yang ditimbulkan akibat infrastruktur seperti kabel dan tiang penyangga yang ada. Pemanfaatan Kerjasama dengan pihak swasta berhasil dilakukan dengan baik, dari segi koordinasi dan komunikasi menghasilkan dampak yang positif begitu juga dengan keuntungan yang terjadi bisa dirasakan kedua belah pihak.

Ketiga, pemanfaatan kerjasama dengan masyarakat. Untuk mengembangkan perekonomian di Desa Kutuh, Pemerintah Desa Kutuh memanfaatkan kerjasama dengan masyarakat. Pemanfaatan kerjasama ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat Desa Kutuh demi bisa berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian desa, Melalui program *smart*

village yaitu Desa Wisata dan Sport Tourism Desa Kutuh, pemerintah desa mengajak masyarakat sebagai penyedia layanan akomodasi pariwisata. Pemerintah Desa Kutuh memberdayakan usaha masyarakat dengan membantu pemasaran produk-produk yang dimiliki. Pemerintah Desa Kutuh juga bekerjasama dengan kelompok-kelompok usaha masyarakat dengan memberikan pembinaan dan menata kawasan usaha masyarakat di Pantai Pandawa, Gunung Payung, dan Pantai Tanah Barak. Berdasarkan data yang didapat, laba tertinggi yang pernah didapatkan melalui program ini sebesar Rp. 14.834.990.448,00. Dari pendapatan desa sebesar Rp. 50.583.329.569,00. Hasil ini membuktikan bahwa pemanfaatan kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat berhasil dengan baik.

Mengacu pada analisis hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa indikator pemanfaatan kerjasama sudah berjalan dengan baik. Pemanfaatan kerjasama yang terjadi menimbulkan hubungan timbal balik dan keuntungan antar pihak, peran Pemerintah Desa Kutuh sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kerjasama yang dilakukan baik dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Pihak Swasta, serta masyarakat. Pemanfaatan kerjasama yang dilakukan ditujukan untuk mengembangkan *smart village* di Desa Kutuh untuk bisa menjadi sarana dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, memberdayakan perekonomian lokal, serta menjaga stabilitas desa. Pemanfaatan kerjasama ini juga memberikan prestasi untuk Pemerintah Desa Kutuh yaitu menjadikan Desa Kutuh sebagai salah satu desa terkaya di Indonesia.

4. Partisipasi Masyarakat

Ada tiga hal yang menjadi sorotan dalam partisipasi masyarakat di Desa Kutuh yaitu: partisipasi dalam advokasi kebijakan, sebagai pengawas pemerintah dan menjadi pelaksana program inovasi pemerintah desa. Sehingga adanya peran dari masyarakat Desa Kutuh sangat penting untuk keberlangsungan program-program inovasi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kutuh.

Pertama, partisipasi masyarakat saat advokasi kebijakan. Dalam merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah kebijakan dan program-program inovasi, Pemerintah Desa Kutuh selalu membuka partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses tersebut. Melalui rapat-rapat pada setiap banjar, Pemerintah Desa Kutuh selalu hadir untuk mensosialisasikan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Selain itu pemerintah desa juga selalu membuka forum untuk mendiskusikan kebijakan atau program-program baru pada saat rapat banjar tersebut. Selain itu Pemerintah Desa Kutuh juga membuat inovasi baru yaitu Live Rapat dimana, setiap rapat, forum, diskusi yang dilakukan oleh pemerintah desa akan disiarkan secara *live* atau langsung melalui platform Youtube Desa Kutuh. Harapan dari

Pemerintah Desa Kutuh yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal advokasi kebijakan, namun yang terjadi justru masyarakat hanya menjadi pasif saat berlangsungnya rapat atau forum diskusi yang terjadi. Hal ini disebabkan karena persepsi masyarakat dengan menganggap apa yang dirumuskan oleh pemerintah desa pasti sudah memikirkan mereka dan pastinya akan berdampak baik, kepercayaan tinggi dari masyarakat juga menjadi salah satu penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam advokasi kebijakan.

Kedua, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Pengawasan oleh masyarakat sebenarnya bisa dilakukan dengan melihat alur keuangan desa yang dilaporkan setiap triwulan atau tiga bulan melalui rapat ataupun sistem layanan yang sudah disediakan Pemerintah Desa Kutuh. Namun karena masyarakat sudah menaruh kepercayaan tinggi kepada Pemerintah Desa Kutuh menyebabkan partisipasi mereka dalam melakukan pengawasan masih pasif, Desa Kutuh yang sudah menjadi *role model* desa anti korupsi yang mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa pemerintah sudah melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat hanya melihat hasil dari kinerja Pemerintah Desa Kutuh.

Ketiga, partisipasi masyarakat sebagai pelaksana program. Pemerintah Desa Kutuh selalu mendorong partisipasi masyarakat untuk melaksanakan program-program inovasi yang ada. Partisipasi masyarakat sebagai pelaksana program juga menjadi faktor untuk menilai keberhasilan program-program yang lahir dari penerapan *smart village* di Desa Kutuh apakah bisa memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Desa Kutuh. Mulai dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa partisipasi masyarakat dalam melaksanakannya terbilang baik. dengan antusias masyarakat melaksanakan program-program yang ada. Banyak masyarakat menjadi bagian dari pelaksanaan program pemerintah desa seperti, menjadi kader-kader setiap banjar, menjadi anggota lembaga kemasyarakatan, menjadi mitra desa.

Melalui hasil analisis temuan tersebut menunjukkan bahwa, indikator partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal hal ini dilihat dari segi advokasi kebijakan dan pengawasan masih belum optimal yang disebabkan oleh pasifnya masyarakat Desa Kutuh dalam berpartisipasi. Hal tersebut terjadi karena masyarakat sudah terlanjur memberikan kepercayaan penuh kepada Pemerintah Desa Kutuh sebagai pengayom masyarakat. Kemudian dalam hal pelaksanaan program inovasi pemerintah, bisa dikatakan antusias masyarakat terbilang tinggi karena mereka juga terlibat langsung didalamnya.

5. Pemanfaatan Teknologi

Pemerintah Desa Kutuh selalu mengupayakan inovasi dalam pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan sistem informasi yang efisien dan efektif bagi masyarakat, sehingga segala

sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan tata kelola bisa dirasakan oleh masyarakat secara fleksibel.

Pertama, Pemerintah Desa Kutuh memanfaatkan sistem Open SID Desa Kutuh untuk melakukan pelayanan publik. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan lagi, Pemerintah Desa Kutuh sedang melakukan uji coba Anjungan Desa Mandiri yang nantinya akan ditempatkan pada Mall Pelayanan Publik Desa Kutuh untuk menyambut masyarakat yang akan melakukan pelayanan. Pengadaan dan perawatan *hardware dan software* didukung oleh pemanfaatan dana desa dan APBDesa Kutuh yang menjamin Pemerintah Desa Kutuh selalu memanfaatkan teknologi dengan baik.

Kedua, Kedua, pemanfaatan teknologi pada sektor ekonomi. Melalui peran BUMDA Kutuh dan BUMDES Manik Sedana Kutuh, Pemerintah Desa Kutuh terus gencar dalam mengembangkan perekonomian desa. Penyebaran penggunaan aplikasi *Qris* dilakukan untuk memudahkan transaksi non-tunai di usaha-usaha lokal milik masyarakat. Penggunaan aplikasi *Qris* ditujukan pada pedagang-pedagang di kawasan wisata Desa Kutuh seperti pada kelompok pedagang di Pantai Pandawa dan Gunung Payung. Penggunaan aplikasi *Qris* juga dimanfaatkan untuk menjaga keamanan wisatawan yang berkunjung, begitu juga para pedagang yang tidak perlu membawa banyak uang saat berdagang di kawasan wisata Pantai Pandawa dan Gunung Payung.

Ketiga, pemanfaatan teknologi pada sektor lingkungan. Pemerintah Desa Kutuh memanfaatkan teknologi untuk mengelola lingkungan dengan mengadakan mesin pengolahan sampah di TPS3R Desa Kutuh. Penggunaan mesin pengolah sampah ini dilakukan untuk mempercepat proses pengelolaan sampah sehingga sampah-sampah yang menumpuk bisa cepat habis dan tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Selain optimalisasi sistem SIGAP dan penambahan kamera CCTV menjadi 60 unit dilakukan untuk meningkatkan keamanan desa mengingat maraknya aksi kriminal yang terjadi juga untuk mengawasi mobilitas penduduk yang datang atau pergi.

Melalui analisis hasil temuan diatas, terkait indikator pemanfaatan teknologi sudah bisa dikatakan terpenuhi. Dapat dilihat penggunaan teknologi yang memberikan solusi bagi Pemerintah Desa Kutuh untuk mengembangkan *smart village*. Terlebih kesiapan pemerintah desa dalam mengembangkan inovasi baru berbasis teknologi sangat baik, selain itu dukungan dari Pemerintah Desa Kutuh sangat berperan untuk membantu meningkatkan pemanfaatan teknologi di Desa Kutuh. Penggunaan dana desa dan APBDes dilakukan agar pemanfaatan teknologi bisa dilakukan dengan maksimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang

semakin kompleks. Sehingga melalui strategi ini akan menciptakan pemanfaatan teknologi yang tepat guna didasarkan kepada kebutuhan dan karakter masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian mengenai *Innovative Governance* dalam penerapan *Smart Village* sebagai upaya peningkatan masyarakat di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dapat disimpulkan bahwa penerapan *Smart Village* di Desa Kutuh sudah berhasil mencapai tata kelola pemerintahan yang inovatif. Namun masih ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan lagi seperti pada indikator partisipasi masyarakat dalam upaya advokasi kebijakan dan pengawasan kinerja Pemerintah Desa Kutuh.

Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah.

Pertama, Kepada Pemerintah Desa Kutuh besar harapan penulis untuk selalu konsisten dalam mengayomi masyarakat Desa Kutuh melalui penerapan *smart village*. Mengingat saat ini nama Desa Kutuh sudah terkenal karena berhasil menerapkan *smart village* maka sudah saatnya mengundang *smart village* dalam peraturan desa dengan bentuk “Peraturan Desa Kutuh Tentang Penerapan Desa Pintar (*Smart Village*) di Desa Kutuh” yang memuat mengenai filosofi, tujuan, teknis penerapan, program-program, larangan dan sanksi selama penerapan *smart village* di Desa Kutuh.

Kedua, Kepada Pemerintah Desa Adat Kutuh agar selalu bergandengan dan bersinergi dengan Pemerintah Desa Kutuh dalam mendukung Penerapan *smart village* demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kutuh.

Ketiga, Kepada Mitra Desa Kutuh harus selalu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai mitra dalam pengembangan *smart village* sebagai tata kelola pemerintah inovatif berlandaskan kekuatan dari pemanfaatan kerjasama yang terjalin.

Keempat, Kepada Masyarakat Desa Kutuh agar senantiasa memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Desa Kutuh. Melalui program-program inovasi yang ada merupakan bentuk respon Pemerintah Desa Kutuh dalam menjawab urgensi masyarakat di Desa Kutuh.

Kelima, Kepada Penulis dan Peneliti lain semoga penelitian ini dapat dikembangkan untuk menghasilkan kajian-kajian baru yang lebih akurat dan berguna untuk mengembangkan *innovative governance* dan *smart village*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bandur, Agustinus. (2019). *Penelitian Kualitatif Studi Multi Disiplin Keilmuan Dengan Nvivo 12 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dini, Ajeng. (2019). *Buku Pintar Pemberdayaan Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Firdaus. (2020). *Pekanbaru Madani Edisi II (Dari Metropolitan Menjadi Smart City Menuju Masyarakat Madani)*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Gunawan, Aris, Dinanti. (2021). *Smart Village: Mewujudkan SDG's Desa Berbasis Keterpaduan Pengelolaan dan Inovasi Digital*. Malang: UB Press.
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Istianto, Bambang. (2011). *Manajemen Pemerintahan (Dalam Prespektif Pelayanan Publik)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurniadi. (2020). *Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Labolo, Muhadam. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nain, Umar. (2019). *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Katulistiwa.
- Panji, Sentosa. (2018). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal:

- Among, R. L. (2018). Analisis Pemerintahan Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Studi Kasus di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. *Jurnal Public Policy*, 1-11.
- Atrianingsi, S. (2020). Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap E-Government: Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 80-88.
- Dema, N. A. (2021). Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan (PRAJA)*, 64-75.
- Dian, H. (2019). Pengembangan Konsep *Smart Village* Bagi Desa-Desa di Indonesia. *Jurnal IPTEK-KOM*, 1-16.
- Dyah Ayu, V. B. (2020). *Implementation of Innovative Governance in The Renewal of SiPongi Systems: Efforts to Overcome Forest and Land in Indonesia*. *Administrative Science*, 1-14.

- Egusquiza A., C. M. (2019). *Mapping of Innovative Governance Models to Overcome Barriers for Nature based Urban Regeneration. Sustainable Build Environment System*, 1-17.
- Fadila, N. (2022). Pengembangan Desa Cerdas Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Desa*, 25-35.
- Gani, A. G. (2018). Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer). *Jurnal Sistem Informasi*, 16-29.
- Hapzah, S. N. (2020). Tata Kelola Inovasi Pelayanan Publik: Dimensi Kelembagaan, Aktor Kebijakan Dan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 135-164.
- Wirantari, I. D. (2021). Pengembangan Website Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Bona, Gianyar. *Journal of Contemporary Public Administration*, 13-19.

Peraturan Perundang-Undangan:

Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Desa Pintar (*Smart Village*) di Desa Kutuh.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Skripsi:

Oktaviani, R. (2020). *Innovative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Kabupaten Banyumas*. Universitas Jendral Soedirman.

Website:

Desa Kutuh. (2024). Data Wilayah. *kutuh-badung.desa.id*. <https://www.kutuh-badung.desa.id/data-wilayah>

E-IKM Kutuh. (2024). Grafik IKM Tahun 2023. *ikm.desakutuh.co.id*. https://ikm.desakutuh.co.id/home.php?page=grafik_ikm_tahun&tahun=2023